

Training and Assistance in the Preparation of Financial Reports for Village Enterprises in Rowotamtu Village Using Microsoft Excel

Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rowotamtu Dengan Menggunakan Aplikasi Excel

Dafillah Vike Eryana, Dwi Fera Istiqomah, Siti Aisyah, Olivia Anandyta, Nurgapita Puspaningrum, Arisona Ahmad

Politeknik Negeri Jember, Kabupaten Jember

Email: dafillahvikee@gmail.com

Abstract - *Makmur Sejahtera Enterprises in Rowotamtu Village, Rambipuji Subdistrict, Jember Regency, is one of the initiatives aimed at empowering the village economy through the utilization of Village Funds. However, the continued use of manual financial management has become a major obstacle to achieving transparent and accountable governance. This training and mentoring program was created to improve the skills of BUMDes managers in generating digital financial reports with Microsoft Excel. A participatory and practical approach was employed, involving stages of problem identification, hands-on practice, and evaluation. The results showed that the use of Excel significantly improved the accuracy, efficiency, and organization of financial records. Additionally, participants demonstrated an increased understanding of regulations and reporting systems. This activity proves that simple digitalization can serve as a practical solution to support transparency in village financial management. Long-term success, however, depends on the commitment and consistency of the managers in sustainably implementing the system.*

Keywords: *BUMDes, Financial Reporting, Training, Excel*

Abstrak – Badan Usaha Milik Desa Makmur Sejahtera di Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Namun, pengelolaan keuangan yang masih bersifat manual menjadi hambatan utama untuk mencapai pengelolaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan yang jelas dan bertanggung jawab berbasis digital menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dan aplikatif, melalui tahapan identifikasi masalah, praktik langsung, hingga evaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan Excel secara signifikan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keteraturan pencatatan keuangan. Selain itu, pemahaman terhadap regulasi dan sistem pelaporan juga mengalami peningkatan. Kegiatan ini membuktikan bahwa digitalisasi sederhana mampu menjadi solusi praktis untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada komitmen dan konsistensi pengelola dalam mengimplementasikan sistem secara berkelanjutan.

Kata kunci: BUMDes, Laporan Keuangan, Pelatihan, Excel

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil membutuhkan pembaruan agar dapat mendukung pembangunan desa yang lebih maju dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa sehingga terhindar dari kemiskinan [1]. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 sebagai pedoman dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2017. Melalui kebijakan ini, pemerintah mulai menyalurkan dana desa guna mendukung pelaksanaan berbagai program

pembangunan di tingkat desa. Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman pokok dalam menyusun kebijakan pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai menggunakan dana milik desa, serta menjadi rujukan bagi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa saat menetapkan skala prioritas penggunaannya. Dana alokasi desa difokuskan untuk mendukung kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan keberhasilan program sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat desa, khususnya dalam aspek pemberdayaan [2].

Pemberdayaan masyarakat dipilih oleh pemerintah desa sebagai langkah strategis dalam menghadapi beragam persoalan yang muncul di tingkat desa [3]. Langkah ini difokuskan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat desa. Selain itu, pemberdayaan mencakup penguatan kapasitas dan daya tahan masyarakat, penyediaan sistem informasi desa, serta dukungan terhadap layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat marginal. Aspek kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kejadian luar biasa juga termasuk dalam prioritas. Pemerintah turut mendukung penyediaan permodalan dan pengelolaan kegiatan usaha yang bersifat produktif, baik melalui maupun melalui kerja sama dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), serta mendukung pengembangan kelompok usaha masyarakat, koperasi, dan lembaga ekonomi desa lainnya. Seluruh program tersebut dirancang berdasarkan analisis kebutuhan desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa.

Mengacu pada Pasal 19 Permendes No 4 Tahun 2015, BUMDes diizinkan untuk menjalankan usaha dengan pendekatan sosial [4]. Jenis usaha ini dilakukan secara kolektif dan bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pemahaman terhadap BUMDes sebagai entitas bisnis sosial perlu diperkuat, agar fokusnya tidak semata-mata pada keuntungan pihak tertentu, melainkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat secara menyeluruh. Diharapkan, BUMDes mampu menjalankan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa ketergantungan terus-menerus pada Dana Desa. Dengan cara ini, BUMDes dapat berperan sebagai motor penggerak kemandirian desa dan menjadi agen perubahan dalam pembangunan ekonomi desa, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat [5]. Masyarakat desa diharapkan dapat menjadi mandiri dan sejahtera dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desanya. Proses pemberdayaan masyarakat desa menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka [6].

Pada tahun 2025, dana desa untuk wilayah tertinggal dapat dialokasikan untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, layanan sosial, pengembangan ekonomi yang mendukung kegiatan operasional BUMDes, serta program pemberdayaan dan pelatihan. Dalam sektor infrastruktur, dana tersebut dapat dimanfaatkan

untuk membangun akses jalan menuju desa guna meningkatkan keterjangkauan. Di bidang layanan sosial dasar, penggunaan dana meliputi penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi, listrik, serta layanan pendidikan anak usia dini (PAUD). Sementara itu, pengembangan ekonomi difokuskan pada penguatan potensi ekonomi lokal dan penguatan kolaborasi antara BUMDes dan koperasi, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pengembangan ekonomi desa, sehingga BUMDes seharusnya dirancang berdasarkan potensi lokal serta kebutuhan riil masyarakat [2]. BUMDes Makmur Sejahtera yang berlokasi di Dusun Curah Lowo, Desa Rowotamtu, didirikan pada tahun 2017 sebagai bagian dari kebijakan nasional yang menggalakkan pembentukan BUMDes secara bersamaan di setiap desa. Meskipun secara administratif BUMDes telah terbentuk, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan sumber daya dan sistem pendukung yang memadai. BUMDes ini menjalankan kegiatan usaha seperti budidaya ikan lele dan penjualan pakan, namun belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan maupun penguatan ekonomi desa secara menyeluruh. Salah satu hambatan utama yang masih dialami adalah tata kelola pencatatan keuangan yang belum terorganisir secara optimal. Pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis, yang hanya mencakup transaksi pemasukan dan pengeluaran secara sederhana. Pengelolaan data secara manual yang masih digunakan di banyak instansi pemerintahan sering mengalami berbagai masalah. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam menemukan dokumen dengan cepat dan efisien karena sistem pengarsipan yang kurang teratur [7]. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja BUMDes, serta menghambat upaya pengembangan usaha secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pembenahan dalam sistem administrasi dan keuangan BUMDes agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang efektif dan berdaya saing.

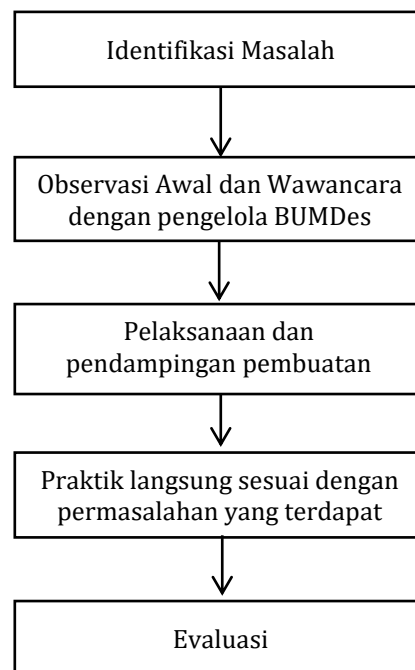
Penggunaan pencatatan manual melalui buku yang masih diterapkan oleh BUMDes Makmur Sejahtera belum mampu mendukung penggabungan dan optimalisasi dalam proses pencatatan serta pembuatan laporan keuangan. Sistem pencatatan secara konvensional membawa risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pencatatan yang menggunakan komputerisasi yakni membutuhkan waktu yang

lama, risiko kehilangan data, dan perlu pengawasan tinggi [8]. Karena itu, dibutuhkan pelatihan, penguatan, dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes untuk beralih ke sistem pencatatan digital. Pemanfaatan teknologi dapat mencegah hilangnya arsip akibat bencana fisik seperti kebakaran atau banjir [9]. Pelaporan dana desa bisa dilakukan dengan lebih cepat, serta hasil laporan keuangan menjadi lebih tepat dibandingkan pelaporan manual [10]. Transformasi ini akan dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan, disertai pelatihan dan pendampingan dalam proses pelaporannya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes Makmur Sejahtera dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya keterbukaan ini, diharapkan peran BUMDes semakin besar dalam mendukung pembangunan desa serta mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi warga Desa Rowotamtu.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan ini menggunakan pendekatan yang partisipatif dan aplikatif. Artinya, pengelola BUMDes Makmur Sejahtera tidak hanya menerima materi secara pasif, melainkan terlibat secara aktif dalam seluruh proses pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan langsung di lokasi BUMDes dengan suasana santai namun tetap berorientasi pada tujuan utama, yaitu agar peserta dapat memahami dan menyusun laporan keuangan secara mandiri menggunakan Microsoft Excel. Pelatihan ini tidak hanya mencakup penyampaian teori, tetapi juga diisi dengan praktik langsung, simulasi, serta pendampingan intensif sejak awal hingga peserta mampu menerapkan keterampilan tersebut dalam kegiatan operasional BUMDes sehari-hari.

Kegiatan pelatihan ini disusun secara sistematis agar dapat menjawab permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMDes Makmur Sejahtera, yakni pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual/konvensional, bahkan beberapa pendapatan tidak tercatat sama sekali. Untuk itu, kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan (Gambar 1) yang saling terhubung.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan 1 Survei Pendahuluan

Hasil survei pendahuluan (Gambar 2) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui usaha yang belum berbadan hukum meskipun perangkat desa wajib menyampaikan laporan pemanfaatan dana tersebut. Salah satu cara pelaporan ini terealisasi lewat pembentukan usaha yang saat ini sedang berjalan. Perangkat desa juga masih kurang mengerti pentingnya pendirian badan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan struktur pengurus, terutama mengenai tugas dan tanggung jawab pengawas BUMDes. Hal ini membuat pemisahan wewenang antara perangkat desa dan pengelola BUMDes belum dipandang sebagai prioritas.



Gambar 2. Kegiatan Survei

Keterbatasan tenaga kerja manusia dalam struktur perangkat desa maupun pengurus BUMDes, terlihat dari sisi jumlah maupun kemampuan. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada aparatur desa, serta kurangnya keterlibatan generasi muda yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan sistem informasi dan penyusunan laporan. BUMDes belum memiliki aplikasi atau sistem informasi sederhana yang mampu mendukung pelaporan keuangan untuk kegiatan usaha yang dijalankan.

Kegiatan 2 Pendampingan Perangkat Desa BUMDes

Kegiatan pendampingan bertujuan utama untuk memperkenalkan aplikasi pengelolaan BUMDes kepada perangkat desa. Dalam proses ini, dilakukan pelatihan dan simulasi penggunaan aplikasi secara langsung agar perangkat desa dapat memahami operasional sistem dengan cara yang praktis (Gambar 3).



Gambar 3. Pelatihan dan Pendampingan

Pendampingan diawali dengan pemberian pemahaman tentang dasar hukum BUMDes berdasarkan Peraturan MenDes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No 4 Tahun 2015. Peraturan ini menjelaskan secara detail tata cara pendirian, susunan pengurus, pengelolaan, serta proses pembubaran BUMDes, sehingga menjadi acuan utama bagi perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan badan usaha milik desa dengan cara yang legal dan tertib. Edukasi mengenai peraturan ini bertujuan untuk membekali perangkat desa dengan pemahaman yang komprehensif agar mereka mampu menyesuaikan pengelolaan BUMDes dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman tersebut sangat penting agar setiap langkah pengelolaan tidak hanya berjalan sesuai kebutuhan lapangan, tetapi juga sesuai aturan yang resmi. Dengan memahami regulasi yang ada, perangkat desa akan menyadari pentingnya penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi dan sistematis sebagai alat bantu dalam menjalankan

administrasi dan pelaporan keuangan BUMDes secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola BUMDes dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Pengenalan aplikasi kepada semua perangkat desa dilakukan sebagai persiapan untuk menggunakan aplikasi secara langsung (Gambar 4). Tujuannya adalah agar seluruh perangkat desa, baik yang berperan sebagai operator maupun yang tidak, mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai aplikasi tersebut, memperoleh pemahaman yang jelas mengenai fungsi aplikasi tersebut. Pemahaman ini menjadi prasyarat penting sebelum diberikan panduan pengoperasian dan dilakukan simulasi penggunaan aplikasi. Simulasi ini dimaksudkan agar calon operator atau administrator dapat mengelola kegiatan keuangan sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat menentukan hasil akhir berupa laba atau rugi dari transaksi yang terjadi dalam operasional BUMDes.



Gambar 4. Simulasi Pengoperasian Sistem Aplikasi Penyusunan laporan Keuangan

Kegiatan 3 Evaluasi Kegiatan

Setelah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi Excel sederhana, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan. Penggunaan Excel membantu mengurangi kesalahan, mempercepat proses pencatatan, serta mempermudah pembuatan laporan keuangan yang lebih teratur dan sistematis. Meski demikian, pendampingan lanjutan tetap diperlukan agar pengelola BUMDes dapat menguasai dan konsisten menggunakan aplikasi tersebut secara maksimal. Secara umum, pelatihan ini berhasil memberikan solusi praktis atas masalah pencatatan manual sekaligus meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam mengelola laporan keuangan secara digital. Kegiatan ditutup dengan foto bersama (Gambar 5).



Gambar 5. Foto bersama di akhir pelatihan

4. PENUTUP

Setelah mengikuti pelatihan & pendampingan, para pengelola diharapkan mampu mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel. Aplikasi yang telah dilatihkan diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Langkah berikutnya adalah mengimplementasikan hasil dari aplikasi tersebut dalam rangka memenuhi harapan masyarakat desa terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan BUMDes, sistem aplikasi digunakan sebagai sarana untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan. Namun, keberhasilan pemanfaatan aplikasi tersebut sangat bergantung pada perangkat desa sebagai pengelola BUMDes, yang menentukan seberapa optimal aplikasi ini digunakan dalam mengelola dana milik desa, melaksanakan pencatatan serta menyusun laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Kartika, "Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo," *J. Bina Praja*, vol. 04, no. 03, pp. 179–188, 2012, doi: 10.21787/jbp.04.2012.179-188.
- [2] J. Junaidi, "Pendampingan Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara," *Reson. J. Ilm. Pengabd. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–7, 2020, doi: 10.35906/resona.v4i1.286.
- [3] M. Y. Syaifudin and M. F. Ma'ruf, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)," *Publika*, pp. 365–380, 2022, doi: 10.26740/publika.v10n2.p365-380.
- [4] M. Desa, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2015," *Jakarta*, pp. 1–65, 2015, [Online].
- [5] R. Mutiarni, S. Zuhroh, and L. P. Utomo, "Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan - Jombang," *Comvice J. community Serv.*, vol. 2, no. 1, pp. 21–28, 2018, doi: 10.26533/comvice.v2i1.124.
- [6] Z. Hidayah, A. Mulyana, E. Susanti, S. Lestari, and P. Pujiastuti, "Pendampingan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam kaitannya sebagai infant organisasi," *Semin. Nas. Pengabd. Kpd. Masy. Univ. Terbuka*, vol. 1, no. 1, pp. 474–485, 2018.
- [7] I. Saefulrahman, R. Muhammadi, M. F. D. Sakti, and J. N. Alpasha, "Implementasi Sistem Manajemen Kearsipan Digital di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Bandung Mini," no. 1, pp. 1–12, 2025.
- [8] D. Felia Putri and N. Nurlaila, "Analisis Sistem Pencatatan Manual Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Akuntan Di Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan," *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya, Teknol. dan Pendidik.*, vol. 1, no. 6, pp. 763–770, 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i6.90.
- [9] Nasir, "Strategi Digitalisasi Arsip untuk Meningkatkan Akurasi dan Keamanan Data di PT Pegadaian (Persero) CP Sungguminasa," vol. 1, no. 2, pp. 58–64, 2025.
- [10] M. A. Ndruru and E. Baene, "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan)," *J. Akunt. Manaj. dan Ekon.*, vol. 1, no. 2, pp. 275–285, 2022.

Ruang kosong ini untuk menggenapi jumlah halaman sehingga jika dicetak dalam bentuk buku, setiap judul baru akan menempati halaman sisi kanan buku.